

SKRIPSI

**RELASI KUASA ANTAR UWA PADA KOMUNITAS MASYARAKAT
TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP**



Disusun Oleh:

MUH TOMMY ANUGRO HARYUM

E111 16309

DAPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**RELASI KUASA ANTAR UWA PADA KOMUNITAS MASYARAKAT
TOLOTANG DI KABUPATEN SIDRAP**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

Muh Tommy Anugro Haryum
(E111 16 309)

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Pada Tanggal 21 September 2021 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si
Nip. 195501281985021001

Pembimbing Pendamping

Dr. Gustiana, S.IP, M.Si
Nip. 197308131998022001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si, P.hD
NIP. 196212311990031023

ABSTRAK

Muh Tommy Anugro Haryum. Nim E111 16 369. Relasi kuasa Antar Uwa Pada Komunitas Masyarakat Tolotang di Kabupaten Sidrap. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Muhammad, S.IP,M.Si dan Dr. Gustiana A. Kambo. S.IP,M.Si

Kepemimpinan masyarakat adat di Indonesia sangat berbeda pelaksanaannya dengan praktik kepemimpinan modern pada saat sekarang ini, serta model kepemimpinan masyarakat adat juga bervariasi dan disesuaikan dengan tempat di mana mereka berada. Pada setiap komunitas manusia memiliki struktur sosial atau tatanan baku yang disepakati serta fungsi yang melekat pada setiap bagian struktur sosial tersebut.

Pada kedudukan atau posisi, peranan, dan pola kepemimpinan serta faktor-faktor yang pengikat yang dapat diterapkan dalam bentuk tatanan baku. Sebab dalam suatu komunitas sangat perlu adanya Pattern yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku setiap anggota komunitasnya. Seperti halnya dengan Seperti pada struktur masyarakat tolotang yang berada di Kelurahan Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan beserta sumber kekuasaan *Uwata* dan *Uwa* dalam struktur komunitas masyarakat tolotang dan Mengetahui hubungan relasi politik antara uwa dalam struktur masyarakat tolotang. Penulis juga melakukan studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjawab bagaimana relasi horisontal dan vertikal antar *uwa* di kelurahan amparita kabupaten sidrap. adapun pendekatan, konsep dan teori yang digunakan yaitu Konsep Teori Kekuasaan dan Konsep Kepemimpinan.

Pada hasil penelitian ini, ditemukan gambaran dalam struktur masyarakat adat tolotang di Kelurahan Amparita yang memiliki bentuk relasi kuasa yang bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Kekuasaan yang bersifat vertikal dimiliki oleh *Uwatta* sebagai pemimpin tertinggi dalam struktur masyarakat adat tolotang. Hubungan yang bersifat vertikal ini biasanya keputusan yang diambil terkait acara adat dan ritual keagamaan. Sementara kekuasaan yang bersifat horizontal terbangun antara para pemangku adat berdasarkan wilayah masing – masing dalam relasi hal antar *uwa*. Hubungan tersebut bisanya terbangun antara *uwa* sebabkan oleh masalah yang dihadapi oleh umatnya.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Tradisional, Tolotang

ABSTRACT

Muh Tommy Anugro Haryum. Nim E111 16 3069. Power relations between Uwa in the Tolotang Community in Sidrap Regency. Under the guidance of Prof. Dr. Muhammad, S.IP,M.Si dan Dr. Gustiana A. Kambo. S.IP,M.Si

Indigenous people's leadership in Indonesia is very different from the current practice of modern leadership, this leadership model of indigenous, peoples also varies and is adapted to the place where they are located. Every human community has an agreed social structure or standard order and functions attached to each part of the social structure. Is it related to the position or position, role, and pattern of leadership as well as binding factors that can be applied in the form of a standard order. Because in a community it is very necessary to have a pattern that functions as a regulator of the behavior of each member of the community. As is the case with the Tolotang community structure in Amparita Village, Tellu Limpoe District, Sidenreng Rappang Regency.

This study aims to describe how to know the sources of power of Uwata and Uwa in the community structure of the Tolotang community and to find out how the political relations between Uwata and Uwa are in the structure of the Tolotang community. The author also conducted a case study based on qualitative research. Data collection was carried out by interviewing key informants who were considered to be able to answer how the horizontal and vertical relations between UWA in Amparita sub-district, Sidrap district. As for the approaches, concepts and theories used, namely the Concept of Power Theory and the Concept of Leadership

In the results of the research, it has been found how in the structure of the Tolotang indigenous people in the Amparita village, power relations that are vertical and horizontal are formed. Uwatta has vertical power as the highest leader in the structure of the Tolotang indigenous people. This vertical relationship is usually a decision taken related to traditional events and religious rituals. while horizontal power is built up among customary stakeholders based on their respective territories in terms of uwa. Usually the relationship that is built between Uwa is caused by problems faced by his people.

Keywords: Power Relations, Traditional, Tolotang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan memanjatkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah untuk melatih diri dan mengembangkan wawasan berpikir. Adapun judul penelitian skripsi ini adalah "Relasi Kuasa Antar Uwa Pada Komunitas Masyarakat Tolotang Di Kabupaten Sidrap". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Departemen Ilmu Politik."

Selain itu terimakasih yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis, **Haryum.B Dan Syamsiah** yang telah memberikan kasih sayang yang begitu tulus. Dua orang malaikat gagah dan cantik yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moral dan material yang tak lupa diiringi do'a disetiap sujudnya. Semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tua penulis dan tentunya bangsa dan negara. Serta semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini. penulis menyadari bahwa banyak hambatan yang dialami, namun berkat bimbingan dan dorongan dari dosen pembimbing dan pihak-pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menggunakan judul dalam penyusunan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan

ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta Staf dan jajarannya
3. Bapak **Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas
4. Bapak **Prof.Dr.Muhammad, S.IP,M.Si** selaku Pembimbing I dari penulis selama proses perkuliahan di Universitas Hasanuddin, yang selalu memberi motivasi, bimbingan, arahan dan dukungan.
5. Ibu **Dr.Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta motivasi selama penulis menyusun skripsi.
6. Seluruh dosen pengajar **Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (Alm); Prof. Dr. Armin, M.Si; Prof Muhammad M.Si; Dr. Muhammad Saad, MA; Prof Basir Syam, M.Ag (Alm); Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D; A. Naharuddin S.Ip, M.Si; A. Ali Armunanto, S.IP,M.Si; Dr. Phil Sukri, M.Si, Ph.D; Dr. Ariana Yunus, S.Ip, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo S.Ip, M.Si; Endang Sari, S.Ip, M.Si; Ummi Suci Fathiah, S.Ip,**

**M.Si; Hariyanto, MA; Dr. Imran, M.Si; Sakinah Nadir, S.Ip,
M.Si; Dan Zulhajar, S.Ip, M.Si**

7. Terima Kasih untuk Informan utama penulis **Uwa Sunarto** telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan sebagai toko adat di kelurahan amparita.
8. Terimakasih. Bapak Uwa Sunarto, Bapak Uwatta Jappi, Bapak Abdi Mahesa, S.S, Ibu Lurah Jumarti, telah bersedia membantu penulis dalam menemukan informasi
9. Terima Kasih Kepada Bapak Prof.Dr.Pawennari Hijjang, Ma atas informasi dan arahnya selaku Akademisi Universitas Hasanuddin.
10. Terima kasih untuk keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis selama berorganisasi di kampus. Kanda-kanda **RESTORASI 2012, KONSOLIDASI 2013, AMANDEMEN 2014, DELEGASI 2015, adik-adik DEKRIT 2017, REVOLUSI 2018 dan DIPLOMASI 2019, DINAMIS 2020**
11. Terima kasih untuk **BEM Kema FISIP Unhas** telah memberi makna Bersama Bersatu Berjaya diatas kuningnya tanah dan dibawah birunya langit
12. Terima Kasih untuk **UKM Bola Fisip Unhas** yang telah memberikan kesempatan bagi saya dalam mengasah skil saya dan membantu menyegarkan kembali tubuh saya yang sedang lelah dalam dunia perkuliaan.

13. Terima kasih **Ilmu Politik Unhas 2016 (Marvelous)** telah kebersamai di ruang kuliah selama kurang lebih 5 (lima) tahun
14. Terima kasih untuk saudara saudariku **REFORMASI 2016, Agung, Gazali, Mar'ie, Anggun, Anwar, Bias, Riswan, Arin, Alfa, Eki, Widya, Mul, Caca, Apri, Nurul, Salwah, Fida, Wanda, Ira, Risma, Gusti, Indah, Wide, Tenri, Iwan, Wawan.** yang memberikan cerita sedih, susah, senang, bahagia dan hal-hal tak terlupakan selama penulis menjalani dinamika- dinamika dalam kampus.
15. Terima kasih untuk **KKN Reguler Gel. 102 Kabupaten Bulukumba.** khususnya Posko induk kecamatan Bulukumba, **Lala, Putri, Ainun, Onis, Anita, Kevin, Darul, Headir.** Terimakasih atas canda tawa, semangat dan kerja samanya sejak 29 juni 2019 hingga detik ini.
16. Terima kasih untuk **Pemadam Kelaparan, Arin, Eki, Mul, Agung, Gazali, Wawan, Anggun, Iwan, Anwar** atas tim yang teramat sangat hebat dan kuat
17. Terima Kasih Kepada **Akbar Najemudin, S.IP.** Fransiska Dan Wahyudi yang selalu setia dan menyempatkan waktunya untuk menemani dalam proses penelitian di Kelurahan Amparita (Sidrap)

Selebihnya terimakasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu persatu.

Sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai sejarah dalam penulis menjadi mahasiswa. Akhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat penelitian :	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Teori Kekuasaan	7
2.2 Konsep Kepemimpinan	13
2.2.1 Kepemimpinan Tradisional	16
2.3 Kerangka Pemikiran	21
2.4 Skema Pikir	23
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	24
3.2 Dasar Dan Tipe Penelitian.....	24
3.3. Sumber Data	27
3.4 Teknik penetapan informan	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data	30
BAB IV.....	32
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	32
4.1. Keadaan Geografis.....	32

4.2. Keadaan Demografi.....	32
4.3. Sejarah dan Agama Kehadiran Masyarakat Adat Tolotang di Amparita.....	33
BAB V.....	37
HASIL DAN PEMBAHASAN	37
5.1 Relasi Kuasa Vertikal Antar Uwatta Ke Uwa.....	37
5.1.1 Hubungan Antar Uwatta dan Uwa	40
5.1.2 Konflik Antar Uwatta dan Uwa	42
5.2 Konsensus Yang Terbangun Antar Uwa.....	46
5.2.1. Aktivitas dan Gaya Relasi Horizontal Antar Uwa	49
BAB VI.....	56
PENUTUP	56
6.1 KESIMPULAN	56
6.2 SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.....	33
Tabel 4.2.....	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masyarakat adat adalah komunitas individu yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas". Masyarakat tersebut masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya. Pandangan dasar dari kongres I Masyarakat Adat Nusantara tahun 1999 menyatakan bahwa "masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, serta kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat". Secara sederhana dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggalnya.

Suku-suku yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai suku asli karena mereka merupakan keturunan dari penduduk asli yang mendiami negeri tersebut sejak dulu kala sebelum masuknya bangsa penjajah, atau sebelum adanya pengaturan batas-batas wilayah administratif seperti yang berlaku sekarang, dan yang mempertahankan atau berusaha mempertahankan, terlepas dari apapun status hukum mereka. sebagian atau semua ciri dan lembaga sosial, ekonomi, budaya dan politik yang mereka miliki. Dalam pengertian itu masyarakat

adat juga dikenal sebagai memiliki bahasa, budaya, agama, tanah dan teritori yang terpisah dari kelompok masyarakat lain, dan hidup jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern.

Keberadaan masyarakat adat dalam Negara kesatuan Indonesia telah lama diakui dalam konstitusi. Dasar konstitusional keberadaan dan hak masyarakat hukum adat UUD 1945 mengatur keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang berbeda dengan subyek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak UUD 1945 periode pertama di mana pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai “persekutuan hukum rakyat” yaitu masyarakat hukum adat yang keberadaannya sudah ada sebelum proklamasi Republik Indonesia.

Kepemimpinan masyarakat adat di Indonesia sangat berbeda pelaksanaannya dengan praktik kepemimpinan modern pada saat sekarang ini, serta model kepemimpinan masyarakat adat juga bervariasi dan disesuaikan dengan tempat di mana mereka berada. Ada yang melegitimasi melalui dukungan dari masyarakatnya ataupun juga dari kewibawaan dan kharisma seorang pemimpin itu sendiri.

Dilihat dari ciri-ciri dan sifatnya, kepemimpinan masyarakat adat termasuk ke dalam kepemimpinan tradisional. Menurut Kartono (2001), bahwa pimpinan tradisional dapat berpengaruh pada masyarakat di dalam peranan sosialnya baik yang sifatnya positif maupun negatif. Status sosial tersebut pada hakikatnya kebanyakan didapat dari faktor keturunan, kekayaan, taraf hidup, pengalaman hidup, kharisma ataupun jasanya terhadap masyarakat. Dengan demikian pemimpin dan kepemimpinan

tradisional tidak memiliki penunjukkan secara formal legitimasi sebagai pemimpin, tetapi masyarakat menunjuk dan mengakuinya sebagai pemimpinnya.

Pada kepemimpinan tersebut terdapat sistem kepemimpinan adat dimana di dalamnya terdapat komponen-komponen kepemimpinan (struktur) yang saling terikat diantara satu dengan yang lainnya, dan aturan-aturan hukum yang berlaku guna menjalankan kehidupan dalam masyarakat adat tersebut. Pada sistem kepemimpinan tradisional terdapat nilai individu yang sangat kuat (bathin/magis), beserta norma-norma yang selalu dipegang dan dijaga untuk menjaga kewibawaannya sebagai seorang pemimpin .

Secara umum seorang pemimpin masyarakat adat biasanya disebut dengan kepala adat. Pengertian kepala adat adalah bapak masyarakat. Kepala adat memimpin persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan kepala adat mempunyai posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Kepala adat selaku kepala pemerintahan juga sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat.

Pada setiap komunitas manusia memiliki struktur sosial atau tatanan baku yang disepakati serta fungsi yang melekat pada setiap bagian struktur sosial tersebut. Apakah yang berkaitan dengan kedudukan atau posisi, peranan, dan pola kepemimpinan serta faktor-faktor yang

pengikat yang dapat diterapkan dalam bentuk tatanan baku. Sebab dalam suatu komunitas sangat perlu adanya Pattern yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku setiap anggota komunitasnya. Seperti halnya dengan Seperti pada struktur masyarakat tolotang yang berada Dikecamatan Tellu Limpoe, Kelurahan Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut salah satu tokoh masyarakat penganut kepercayaan agama tolotang di kelurahan amparita memperkirakan bahwasanya jumlah penganut masyarakat adat towani tolotang di kelurahan amparita kecamatan tellu limpoe di prediksi sampai 3.000 jiwa.¹ Dalam struktur kepemimpinan masyarakat adat tolotang terbagi atas dua bentuk yaitu vertikal dan horizontal hal itu disebabkan karena dalam sistem kepemimpinan masyarakat adat tolotang terbagi atas dua klaster kepemimpinan yaitu *Uwata* dan *Uwa*.

Posisi *Uwatta* dan *Uwa* dalam struktur kepemimpinan masyarakat tolotang sangat berbeda dari segi fungsi dan tugasnya, dimana *Uwatta* sebutan terhadap pemimpin tertinggi masyarakat adat towani tolotang yang lebih banyak bertugas atau berperan sebagai pemangku upacara adat atau ritual. sementara *Uwa* adalah pemimpin masyarakat adat yang ada di bawah *Uwatta*. Sehingga setiap *Uwa* yang ada di kelurahan amparita kecamatan tellu limpoe kabupaten sidrap memiliki kedudukan yang sama serta fungsi yang sama.

¹ Hasil wawancara dengan Uwa sunarto 3 februari di kediamannya

Uwa sebagai pemimpin atau Tomatoa diwilayah kepemangkuan mempunyai kohesi dan segmen masing - masing. Dalam penjelasan lebih lanjut segmen yang dimaksudkan adalah wilayah kepemimpinan *uwa* yang dimana didalam wilayahnya terdapat beberapa kepala keluarga penganut kepercayaan tolotang yang biasa disebut umat.

Sementara kohesi atau relasi yang terbangun antara *Uwa* biasanya bersifat aksidental, hal itu dapat dilihat dengan keterlibatan *Uwa* sebagai pemimpin, kepemangkuan dalam menentukan arah dukungan politik kepada pasangan calon kepala daerah maupun pemilihan legislatif yang bakal didukung oleh komunitas masyarakat tolotang.

Berangkat dari pernyataan diatas maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bagaimana relasi antara *Uwa* dalam komunitas adat tolotang yang ada diwilayah kelurahan amparita kecamatan tellulimpoe kabupaten sidrap. Dengan luas dan cakupan dari tema penelitian maka saya membatasi dengan meberikan batasan masalah berikut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang menjadi fokus perhatian adalah sebagai berikut:
Bagaimana Relasi Horisontal Dan Vertikal Antar *Uwa* Di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui sumber kekuasaan *Uwata* dan *Uwa* dalam struktur komunitas masyarakat tolotang.
- b. Mengetahui bagaimana relasi politik antara *Uwa* dalam struktur masyarakat tolotang

1.4 Manfaat penelitian :

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah dilakukannya penelitian ini, ada dua aspek yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menjawab fenomena sosial-politik terkait sumber kekuasaan struktur masyarakat adat tolotang
- b. Menunjukkan secara ilmiah relasi kekuasaan antara *Uwa* dalam struktur masyarakat adat tolotang
- c. Memperkaya khasanah kajian Ilmu politik untuk perkembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer terkait dengan masyarakat adat

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Memberikan bahan rujukan bagi yang struktur dan sumber kekuasaan pimpinan adat masyarakat tolotang
- b. Memberikan informasi terkait relasi antara *Uwa* dalam pengambilan keputusan politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep dan teori yang relevan dengan judul atau rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti mencoba menjadikan konsep tersebut sebagai alat analisis tentang Relasi Kekuasaan Antar *Uwa* Pada Komunitas masyarakat Adat Tolotang Di Kab Sidrap. Untuk lebih memperjelas maka penulis menggunakan konsep teori kekuasaan. Aspek tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

2.1 Konsep Teori Kekuasaan

Kekuasaan merupakan konsep yang paling mendasar dalam ilmu-ilmu sosial dan didalamnya terdapat perbedaan titik penekanan yang dikemukakan. Menurut Russel (1988) terdapat batasan umum dari kekuasaan yaitu merupakan produk pengaruh yang diharapkan. Ketika seseorang ingin memperoleh tujuan yang diinginkannya dan juga diinginkan oleh orang banyak, maka orang tersebut harus memiliki kekuasaan yang besar. Faktor pendorong yang menimbulkan keinginan berkuasa antara lain faktor eksplisit dan implisit yang berupa dorongan untuk memperoleh kekuasaan. Faktor eksplisit dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor implisit adalah faktor dari luar yang mempengaruhi seseorang untuk berkuasa.

Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah (agar yang

diperintah patuh) dan juga memberi keputusan- keputusan yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.²

Analisis terpenting dalam kajian Weber adalah. Weber tidak mau mereduksi stratifikasi berdasarkan sudut pandang ekonomi, namun Weber memandang bahwa stratifikasi bersifat multidimensional. Artinya adalah kajian Weber tidak hanya memberikan pengaruh pada kajian ekonomi, tetapi juga memberikan analisis terhadap aspek bidang keilmuan lainnya. Menurutnya masyarakat terstratifikasi berdasarkan ekonomi, status dan kekuasaan. Kekuasaan terhadap manusia dapat dilakukan melalui pengaruh secara fisik dengan cara penghukuman maupun dengan cara mempengaruhi opini melalui propaganda.³

Propaganda merupakan jalur memperoleh kekuasaan yang sulit dikalahkan oleh lawan bila propaganda itu mampu menghasilkan suatu kesepakatan. Kekuasaan terdapat dalam bentuk kekayaan, tentara, pemerintahan, jasa dan pengaruh. Kekayaan bisa merupakan hasil kekuasaan dengan mempergunakan kekuatan tentara dan pengaruh. Sekarang kekuatan ekonomi yang menjadi sumber kekayaan adalah

² Max Weber, *Essay in Sociology*, Oxford Univercity Press, 1946, hal.180, yang diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea, *Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

³ Max Weber, *Essay in Sociology*, Oxford Univercity Press, 1946, hal.180, yang diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea, *Sosiologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

sumber asal semua jenis kekuasaan yang lain. Namun Weber kurang sependapat dengan pandangan tersebut. Ia mengatakan bahwa kekuasaan harus dilihat dari esensi masing-masing.

Kekuasaan ekonomi belum tentu identik dengan kekuasaan yang lain. Orang mencari kekuasaan belum tentu karena ingin menjadi kaya raya. Orang mencari kekuasaan karena pertimbangan kehormatan. Kekuasaan. Dan kehormatan memerlukan jaminan dari adanya ketertiban berdasarkan hukum. Tertib hukum merupakan faktor tambahan penting untuk memperluas kekuasaan dan kehormatan meskipun tidak selamanya menjamin. Weber menyatakan bahwa didalam kekuasaan terdapat kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, walaupun orang tersebut melakukan penolakan. Adanya kesempatan untuk merealisasikan kehendaaknya pada orang lain dalam bentuk pemaksaan tanpa mempedulikan apapun yang menjadi dasar. Dengan kata lain, kekuasaan menurut Weber adalah kesempatan untuk menguasai orang lain.⁴

Kemudian, Weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang dalam kehidupan manusia yang menyangkut dengan kekuasaan. Menurut Weber, wewenang adalah kemampuan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota – anggota masyarakat. Sedangkan kekuasaan dikonsepsikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain tanpa menghubungkannya dengan penerimaan sosialnya yang formal. Dengan

⁴ Ibid hal 183

kata lain, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau menentukan sikap orang lain sesuai dengan keinginan sipemilik kekuasaan. Weber membagi wewenang ke dalam tiga tipe berikut antara lain

Tipe Otoritas Rational, Tipe rational sering juga disebut tipe legal atau formal. Tipe otoritas didasarkan atas keyakinan yang bersifat legalitas atau formal yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat tunduk pada pemerintah dan pemimpinnya karena didasarkan pada aturan legalitas-formal. Dasar otoritas atau wewenang adalah suatu sistem hukum yang berlaku disuatu negara. Suatu sistem hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti agama, tradisi, kebudayaan dll, sehingga sistem hukum itu akan diakui dan ditaati oleh masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, dalam sistem hukumnya diatur kedudukan orang-orang yang memegang kekuasaan menurut jangka waktu tertentu dan terbatas, sehingga rotasi kekuasaan akan berjalan dengan demokratis dan adanya kemungkinan seseorang memegang kekuasaan dalam Jangka waktu yang lama sekali dapat dihindari. Hal ini membedakannya dengan masyarakat tradisional.

Otoritas tradisional, adalah otoritas yang keabsahannya didasarkan pada aturan-aturan tradisional. Otoritas tradisional dapat terjadi antara lain karena nilai-nilai kesucian, kesetiaan pribadi dan lain-lain. Hubungan yang terjadi pada otoritas tradisional lebih merupakan hubungan antara "tuan" dan "hamba". Kepatuhan atas otoritas tradisional bukan kepada undang-

undang atau peraturan, tetapi kepatuhan terhadap pribadi sebagai tuan. Karena itu dalam otoritas tradisional murni tidak kenal wewenang tetap yang didasarkan atas aturan-aturan tetap. Tidak dikenal hirarkhi dan pengangkatan yang teratur atas dasar kontrak bebas dan kenaikan pangkat. Juga tidak dikenal pemberian gaji dan pendidikan tidak dijadikan sebagai norma.

Otoritas Kharismatis, Dasar otoritas kharismatis disandarkan pada sifat-sifat luar biasa yang dimiliki seseorang. Otoritas kharismatis ini pada mulanya terdapat pada para nabi, ahli-ahli penyembuh, ahli hukum, dan para pahlawan-pahlawan perang. Mereka dianggap memiliki kekuatan-kekuatan atau ciri-ciri yang seolah-olah supra-alamiah, supramanuslawi yang oleh para pengikutnya dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena rasa kagum dan rasa hormat dari para pengikutnya, muncullah "pengakuan" yang bersifat pribadi dan bersifat keyakinan. Pengakuan muncul karena didorong perintah batin sehingga ada panggilan dalam arti empatisnya. Sedangkan organisasinya didukung oleh personil murid dan pengiringnya. Jabatan-jabatan tetap tidak dikenal dan tidak ada aturan formal serta pemecatan-pemecatan. Secara sederhana pembagian tipologi otoritas dan wewenang menurut Max Weber dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tipe Otoritas Rational	Otoritas Kharismatis	Otoritas Tradisional
<p>Tipe otoritas atau wewenang rational sering juga disebut tipe legal atau formal. Tipe otoritas didasarkan atas keyakinan yang bersifat legalitas atau formal yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat</p>	<p>Dasar otoritas kharismatis disandarkan pada sifat-sifat luar biasa yang dimiliki seseorang. Otoritas kharismatis ini pada mulanya terdapat pada para nabi, ahli-ahli penyembuh, ahli hukum, dan para pahlawan pahlawan perang. Mereka dianggap memiliki kekuatan-kekuatan atau ciri - ciri yang seolah-olah supra-alamiah, supramanuslawi yang oleh para pengikutnya dilihat sebagai sesuatu yang luar biasa</p>	<p>Otoritas tradisional adalah otoritas yang keabsahannya didasarkan pada aturan-aturan tradisional. Otoritas tradisional dapat terjadi antara lain karena nilai-nilai kesucian, kesetia pribadi dan lain-lain</p>

2.2 Konsep Kepemimpinan

Thoha dalam bukunya Prilaku Organisasi mendefinisikan Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya.⁵ Hal serupa disampaikan Pasolong.⁶ Berdasarkan dari berbagai pandangan tersebut, tampaknya Pasolong menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain dalam melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Sementara itu Kartono mendefinisikan pemimpin sebagai seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kelebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Pendapat lain disampaikan Robbins.⁷ Menurutnya, kepemimpinan itu didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sebuah kelompok menuju pencapaian tujuan kelompok. Sumber dari pengaruh ini bisa saja secara formal, seperti pengaruh yang diberikan oleh kedudukan manajerial tingkat tertentu dalam organisasi/perusahaan. Karena posisi manajemen biasanya disertai kewenangan tertentu yang secara resmi diberikan oleh organisasi, seseorang yang menjalankan peran kepemimpinan tersebut hanya sebatas posisi yang dipegangnya

⁵ Pasolong, Harbani, 2007, Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta, hlm 111

⁶ Kartono, Kartini, 2005 Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 98

⁷ Robbin, Stephen, 2006; Prilaku Organisasi; Perbalindo, Jakarta, hlm 102

dalam organisasi itu. Tetapi, harus diingat bahwa tidak semua manajer adalah pemimpin.

Para pemimpin bisa muncul dari dalam kelompoknya sendiri, tetapi juga bisa dengan penunjukan formal untuk memimpin sebuah kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan pola hubungan, kemampuan mengkoordinasi, memotivasi, kemampuan mengajak, membujuk dan mempengaruhi orang lain. Secara teoretis, terdapat tiga teori yang paling menonjol dari kepemimpinan sebagaimana dikemukakan Siagian yakni:⁸

- a. Teori Genetik Penganut teori ini berpendapat bahwa, “pemimpin itu dilahirkan dan bukan dibentuk” (Leaders are born and not made). Pandangan teori ini bahwa, seseorang akan menjadi pemimpin karena “keturunan” atau ia telah dilahirkan dengan “membawa bakat” kepemimpinan. Teori keturunan ini, dapat saja terjadi, karena seseorang dilahirkan telah “memiliki potensi” termasuk “memiliki potensi atau bakat” untuk memimpin dan inilah yang disebut dengan faktor “dasar”. Dalam realitas, teori keturunan ini biasanya dapat terjadi di kalangan bangsawan atau keturunan raja-raja, karena orang tuanya menjadi raja maka seorang anak yang lahir dalam keturunan tersebut akan diangkat menjadi raja.
- b. Teori Sosial Penganut teori ini berpendapat bahwa, seseorang yang menjadi pemimpin dibentuk dan bukan dilahirkan (Leaders are made and not born). Penganut teori berkeyakinan bahwa semua

⁸ Siagian dalam Pasolong, Opcit, hlm 121-122

orang itu sama dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin. Tiap orang mempunyai potensi atau bakat untuk menjadi pemimpin, hanya saja faktor lingkungan atau faktor pendukung yang mengakibatkan potensi tersebut teraktualkan atau tersalurkan dengan baik dan inilah yang disebut dengan faktor “ajar” atau “latihan”. Pandangan penganut teori ini bahwa, setiap orang dapat dididik, diajar, dan dilatih untuk menjadi pemimpin. Intinya, bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, meskipun dia bukan merupakan atau berasal dari keturunan dari seorang pemimpin atau seorang raja, asalkan dapat dididik, diajar dan dilatih untuk menjadi pemimpin.

- c. Teori Ekologik Penganut teori ini berpendapat bahwa, seseorang akan menjadi pemimpin yang baik “manakala dilahirkan” telah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan, latihan, dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang telah dimiliki.

Jadi, inti dari teori ini yaitu seseorang yang akan menjadi pemimpin merupakan perpaduan antara faktor keturunan, bakat, dan lingkungan yaitu faktor pendidikan, latihan dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan bakat tersebut dapat teraktualisasi dengan baik.

2.2.1 Kepemimpinan Tradisional

Jarang ditemukan konsep dan teori yang berbicara tentang kepemimpinan tradisional secara langsung. Pandangan tentang kepemimpinan tradisional disinggung dalam ilmu sosiologi. Disiplin ilmu Sosiologi melihat kepemimpinan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin selalu ada dalam berbagai kelompok, baik kelompok besar seperti pemerintahan maupun kelompok kecil seperti kelompok arisan. Secara sosiologis, kepemimpinan berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang. Pandangan tentang kepemimpinan tradisional merupakan bentuk dari wewenang.

Tentang wewenang tradisional, Koentjaraningrat⁹ melihat bahwa sistem kekuasaan tradisional yang ada di dunia, baik di Indonesia, Polnesia, Afrika, dan di Asia lainnya memiliki kesamaan konseptual dalam melihat kekuasaan dan kepemimpinan. Dalam negara kuno, di mana kesatuan-kesatuan sosial berupa negara, dengan penduduk yang banyak sehingga memiliki identitas tertentu, wewenang seorang pemimpin tidak lagi hanya dibutuhkan kewibawaan (legitimacy) saja, yang bersumber pada keahliannya, keterampilannya, dan kepandaiannya dalam lapangan-lapangan tertentu.

Akan tetapi, kebanyakan elit penguasa negara kuno untuk mempertahankan dan menjaga loyalitas rakyatnya, menggunakan pendekatan religi serta tradisi budaya untuk memaksakan keseragaman

⁹ Budiarto, Miriam, 1984 *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan, hlm 124

orientasi pada masyarakat yang ada dalam negara tersebut, yang awalnya memiliki aneka warna kebutuhan, kehendak dan keyakinan. Namun di sisi lain ada tokoh tradisional yang menggunakan pendekatan demokratis dengan menggunakan elemen-elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Kedudukan raja atau tokoh adat yang memiliki otoritas kharismatik dapat dihubungkan dengan konsep kosmologinya Heine Geldern, tentang negara dan kedudukan raja di Asia Tenggara.¹⁰ Dimulai dengan menawarkan pengertian pokok tentang kesejajaran antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara jagat raya dan dunia manusia. Hal ini melahirkan suatu kepercayaan kosmos-magis atau kosmosreligius. Konsep ini akhirnya menimbulkan suatu kepercayaan bahwa ibu-kota kerajaan atau istana (puri) bukan saja sebagai pusat politik dan kebudayaan, tetapi juga sebagai pusat magis kerajaan. Status raja kemudian disejajarkan dengan kedudukan dewa, sehingga melahirkan “kultus dewa raja”, yang diharapkan dapat memberi perlindungan, keselamatan dan kesejahteraan bagi semua rakyatnya.

Pandangan senada disampaikan Soemarsaid Moerton¹¹ tentang kepemimpinan Jawa Kuno. Ia mengatakan bahwa orang Jawa kuno melihat rajanya sebagai satusatunya medium yang menghubungkan mikrokosmos manusia dan makrokosmos Tuhan terhadap seluruh jagad raya ini. Sistem pelimpahan kekuasaan ini, merupakan suatu konstruksi

¹⁰ Geldern, R. Heine, 1982. *Konsepsi Tentang Negara & Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Jakarta: Rajawali. hlm 84

¹¹ Budiarto, Miriam 1984, *Kepemimpinan Jawa Kuno*, Op.cit. hlm 65

politik yang sederhana dan yang sangat mudah di dalam penerapannya, karena sistem pertanggung jawaban terletak di satu tangan sehingga dengan demikian memudahkan pengawasan. Hal ini dikarenakan kekuasaan raja adalah juga sesuatu kekuatan. Sebagai kekuatan ia bersumber pada alam semesta dan akhirnya pada Tuhan.

Menurut Ben Abderson¹² hingga kini masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh konsepsi-konsepsi kekuasaan tradisional. Di mana kekuasaan dipandang sebagai suatu kekuatan yang sakti dan keramat, yang secara konkrit ada dalam alam atau berada di luar diri orang yang mempergunakannya.

Tentu ini berbeda dengan Dunia Barat yang secara ringkasnya melihat konsep kekuasaan adalah sebagai suatu abstraksi yang ditarik dari pola-pola interaksi sosial yang terlihat, kekuasaan dianggap berasal dari sumber-sumber yang heterogen, kekuasaan secara inheren tidak membatasi diri, dan dipandang dari segi moral memiliki arti ganda. Tidak heran kemudian kalau kita dapatkan sistem kepemimpinan di tingkat menengah, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat nasional, di mana sifat-sifat tradisional masih lebih mendominasi dibandingkan sifat-sifat kepemimpinan modern. Ini tidak hanya terjadi pada sistem kepemimpinan administrasi negara saja, akan tetapi menurut Koentjaraningrat juga terjadi dalam sektor-sektor kehidupan sosial yang lain, seperti sektor kehidupan perekonomian, keagamaan.

¹² Ibid hal 86

Akan tetapi sebenarnya sistem kepemimpinan tradisional ini banyak terjadi dalam sistem pimpinan informal. Pandangan Koentjaraningrat tentang elit atau pimpinan formal dan non formal, senada dengan gagasan Pareto tentang keberadaan elit formal dan nonformal dalam sebuah masyarakat. Pareto melihat bahwa elit yang berkuasa dalam setruktur sosial itu ada dua, yaitu: elit yang sedang memerintah (governing elite) atau elit formal dan elit yang tidak sedang memerintah (non governing elite) elit non formal. Governing elite terdiri dari orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politis sehingga bisa secara langsung berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan memerintah masyarakat untuk menaati pereturan yang dibuatnya, sedangkan dalam elit informal tidak memiliki wewenang sebagaimana elit atau pimpinan formal seperti jabatan kepemimpinan suku.

Terlepas dari kepemimpinan tradisional yang cenderung didasarkan pada kharisma, tetapi kepemimpinan tradisional umumnya dilaksanakan secara bersama sama (kolegal). Hal ini tercermin dari adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Proses musyawarah dilakukan dalam pertemuan yang melibatkan semua unsur yaitu masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tuan tanah. Pada kesempatan ini, semua unsur memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan usul saran dan pendapat. Dalam musyawarah juga semua orang boleh berbeda pendapat, tetapi hasil yang disepakati tetap dipatuhi oleh pihak yang tidak setuju sekalipun.

Kepemimpinan tradisional dalam pengendalian konflik, aspek ketrampilan dan kepandaian tidak menjadi faktor utama. Aspek yang menjadi faktor utama kepemimpinan tradisional dalam pengendalian konflik adalah pendekatan religi yang diperlihatkan dengan adanya ritual perdamaian yang ditandai dengan pembunuhan binatang tertentu dan makan bersama. Ritual ini yang menjadi pengikat semua orang yang terlibat konflik untuk tidak mengulang lagi karena akan mendapat malapetaka. Untuk memahami wewenang tradisional, perlu diketahui pengertian dan bentuk-bentuk wewenang. Wewenang soekanto mengutip beberapa para ahli dipahami sebagai berikut:¹³

a. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, bila orang-orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.

b. George R. Terry

George R. Terry menjelaskan bahwa wewenang merupakan hak jabatan yang sah untuk memerintahkan orang lain bertindak dan untuk memaksa pelaksanaannya. Dengan wewenang, seseorang dapat mempengaruhi aktifitas atau tingkah laku perorangan dan grup.

c. Mac Iver R. M

Mac Iver R. M, wewenang merupakan suatu hak yang didasarkan pada suatu pengaturan sosial, yang berfungsi untuk menetapkan

¹³ Soekanto, Soejono 2006, Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali, Jakarta hlm 25

kebijakan, keputusan, dan permasalahan penting dalam masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Secara umum seorang pemimpin masyarakat adat biasanya disebut dengan kepala adat. Pengertian kepala adat adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan. Kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan kepala adat mempunyai posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Kepala adat selaku kepala pemerintahan juga sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat.

Dalam Masyarakat adat mempunyai sistem pelapisan sosial yang berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Pada umumnya kepemimpinan masyarakat adat bersifat tunggal dan dalam pengambilan keputusan biasanya diputuskan oleh kepala adat secara tunggal namun dalam masyarakat totoni tolotang sedikit berbeda dengan masyarakat lainya yang ada di sulsel. Seperti pada struktur masyarakat tolotang yang berada dikecamatan amparita kabupaten sidenreng rapping.

Uwa dalam struktur masyarakat tolotang menempati posisi tertinggi. Namun pada tingkatan *Uwa* terbagi pada dua golongan yakni *Uwatta* dan *Uwa* selanjutnya adalah golongan To Sama, yang terdiri dari masyarakat biasa. Status *Uwatta* dan *Uwa* dalam komunitas masyarakat tolotang memiliki peran dan tugas yang berbeda dimana dalam struktur masyarakat tolotang *Uwata* di tempatkan sebagai tokoh sentral atau

pemimpin tertinggi secara keseluruhan oleh masyarakat yang tergolong dalam komunitas masyarakat tolotang. Yang sumber kepemimpinanya didasari oleh garis keturunan.

Sementara *Uwa* merupakan pemimpin komunitas masyarakat tolotang yang tersebar dalam beberapa wilayah, dalam penjelasan lanjut *Uwa* merupakan kepala adat dalam kelompok kelompok kecil disetiap wilayah yang masih tergolong dalam komunitas masyarakat tolotang, yang status kepemimpinanya berada satu tingkat dibawah *Uwa'ta*. Sehingga dalam komunitas masyarakat tolotang kecamatan amparita kabupaten sidrap terdiri atas beberapa *Uwa*.

Walaupun *Uwa'ta* diposisikan sebagai tokoh sentral dan pemimpin tertinggi dalam masyarakat tolotang dikecamatan amparita namun dalam proses pengambilan keputusan *Uwa'ta* tidak bisa mengambil keputusan sepihak sehingga dalam proses pengambilan keputusan harus melalui rapat yang melibatkan seluruh *Uwa* yang merupakan refresentasi masyarakat tolotang yang tersebar diseluruh wilayah kecamatan amparita sidrap. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat kemudian disebarluaskan kepada seluruh masyarakat tolotang melalui *Uwa* kepada seluruh pengikutnya.

2.4 Skema Pikir

